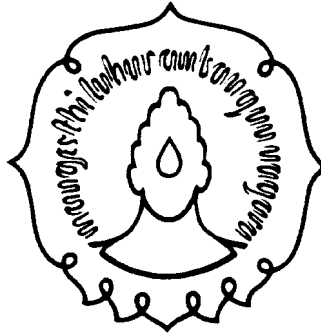


**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 60K/MIL/1995)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

**TUNTAS ADITYO NUGROHO**

**NIM. E. 1103169**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2010**

## **PERSETUJUAN**

Disetujui untuk dipertahankan

Dosen pembimbing

Pembimbing

Edy Herdyanto, SH. MH  
Nip. 195706291985031002

## **PENGESAHAN**

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

### **DEWAN PENGUJI**

1. (.....)

Nip.

2. (.....)

Nip.

3. (.....)

Nip.

Mengetahui

Dekan

## **MOTTO**

“Jika kita terhempas karena kritikan, kita akan kehilangan semangat, jika kita terlena akan pujian, kita akan kehilangan arah hidup. Sebaliknya kita menjadikan kritik dan cambuk untuk mengadakan perbaiki-perbaiki dan pujian sebagai bara untuk mengadakan peningkatan-peningkatan”. (Agus M. Harjana)

## **PERSEMBAHAN**

Penulisan hukum ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus yang senantiasa membimbing dan memberikan pencerahan dalam penulisan skripsi ini
2. Kedua orangtua Bpk. Anselmus Windyono dan (Almh) ibu Sri Sayuti yang selalu memberikan semangat, Ibu pesanmmu akan selalu aku ingat. Bapak terima kasih atas dorongan doa bapak yang setiap hari bapak doakan untukkelancaran skripsi ini.
3. Istriku, Monica Ratih Tyas Prihatnasari, SE, yang selalu memberikan semangat dan dorongan, senantiasa menemani siang dan malam untuk mengerjakan skripsi ini. Terima kasih mah.....
4. Anakku, Hubertus Damar Radityo Kusuma, Terima kasih adik, kamu telah memberikan semangat yang tidak terkira, ayah siang malam mengerjakan skripsi ini seakan tidak ada lelahnya begitu lihat senyummu dan celotehanmu
5. Untuk kakak-kakakku. Ir Tiwul Widiastuti, RW. MM, DR. Wiryanto, SP Rad, Ir. Wijayanti RM, Gatot Satriyo Nugroho. ST, Yuliawan Agung Nugroho, SH, Dyah Ayu Utami. ST, .....Mas, Mbak terima kasih telah memberikan semangat serta dorongan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
6. Untuk dosen-dosen, Pak Pranoto, Pak Hernawan, Pak Raji, Pak Kris, Pak Hartono, .....Terima kasih bapak yang telah mengajak didalam Yusticia Tennis Club.
7. Untuk teman-teman di Fakultas Hukum UNS, ...Mas Parno, Mas Wardi, Mas Wahyono, Mas Totok, Mas Rudi, Mas Didit, Mas Ricky, Mas Bimo, Bintang, Lucky, Adit, Tunggul, Bonus.. (Ayo pak semangat ya....), Yuda, Taufik, Reza, Pras, Ihsan, Hanung, Galih....dan semuanya. Maaf kalau belum tersebut semuanya .....

8. Saudaraku Deny Nurdyansyah, Rico Ardiyanto (Mas terima kasih telah menemaniku setiap hari...Thanks), Mbak Ani (Nuwun ya Mbak), Riyanto, Totok, Dedi..(Terima kasih ya mas...maaf ya kalau aku kadang ngga sabar), Pakdhe Tugimin (Pakdhe, matur nuwun atas saran-sarannya).
9. Untuk sepeda motor mioku AD2182VG, PO Hage, PO Aneka Jaya, PO Nusa, terima kasih telah mengantarku sampai ke kampus .
10. Semua pihak yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan hingga penulisan skripsi ini selesai.

Penulis

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas hukum (skripsi) dengan judul “ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 60K/MIL/1995)” dengan baik, Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata I di Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dengan bantuan dan dorongan dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meski masih dengan beberapa sisi kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya jika dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Moh. Jamin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, MH. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan pembimbing yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak ibu dosen serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama ini
4. Semua pihak yang turut berperan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat pembedaan dan independen, sangat penulis harapkan dari pembaca khususnya guna penyusunan skripsi yang selangkah lebih sempurna lagi. Akhir kata banyak salah dalam tutur kata penulis mohon maaf.

Surakarta,      Juni 2010  
Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
HALAMAN ABSTRAK .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teori .....	8
1. Tinjauan tentang Mahkamah Agung .....	8
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Desersi .....	12
3. Tinjauan Umum tentang Prajurit TNI .....	16
4. Tinjauan Tentang Peradilan Militer .....	18
B. Kerangka Pemikiran.....	28
<b>BAB III      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH.....</b>	<b>23</b>
A. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Penetapan Desersi Pada Masa Perang dan Masa Damai .....	23
B. Akibat Hukum dari Penetapan Desersi Pada Masa Perang dan Pada Masa Damai .....	39



BAB IV	PENUTUP.....	41
	A. Kesimpulan .....	41
	B. Saran-saran .....	43
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## ABSTRAK

**Tuntas Adityo Nugroho, E.1103169, Analisis Terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 60K/MIL/1995), 2010. Skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam penetapan desersi pada masa perang dan pada masa damai dan Untuk mengetahui mengetahui akibat hukum dari penetapan desersi pada masa perang dan pada masa damai dan akibat hukumnya

Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sumber data adalah primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan dengan model analisis kualitatif

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menganalisa data-data, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah bahwa Mahkamah Agung dengan pertimbangan suatu *Judex Factie* telah salah menegakkan hukum yaitu pertimbangan putusan dalam menilai suatu keadaan perang, belum sampai pada suatu kesimpulan bahwa negara dalam keadaan perang tetapi menurut Mahkamah Agung uraian dakwaan oditur militer tersebut baru sampai pada keadaan operasi militer untuk menanggulangi gangguan keamanan saja dan Akibat hukum dari penetapan desersi pada masa damai yang diputuskan oleh Mahkamah Agung membawa konsekuensi hukum sebagai berikut : Tindak pidana yang terbukti dan telah berkekuatan hukum tetap adalah karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai lebih dari tiga puluh hari, Dengan penetapan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan merubah hukuman yang dijatuhkan dari semula putusan Pengadilan Militer Padang adalah berupa pidana penjara selama satu tahun dan pemecatan dari dinas militer dan itu dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi Medan dengan menjadi pidana penjara selama delapan bulan, Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan pemecatan dari dinas militer dan Melalui putusan Mahkamah Agung diperoleh suatu yurisprudensi tentang keadaan perang dan keadaan damai bahwa Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 keadaan perang itu harus dengan keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR. Keadaan yang disampaikan oleh oditur militer dalam surat dakwaan belum masuk dalam kategori perang pada keadaan operasi militer untuk menanggulangi gangguan keamanan saja

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang berlaku di Negara Indonesia, dengan demikian aturan-aturan yang ada di dalamnya mengikat setiap orang yang menjadi warga negara maupun orang yang ada di dalam Negara Republik Indonesia. Warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi : “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945, Negara yang berdasarkan atas hukum berarti segala macam tindakan pemerintahan maupun rakyat harus didasarkan atas hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum .

Dilihat dari segi hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga Negara yang baginya pun berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Baik hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata. Letak perbedaannya hanya adanya beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga Negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan Pertahanan Negara. (Moch Faisal, 1994 : 14). Mengingat tugas dan kewajiban anggota Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai peranan penting, maka perlu adanya penegakan disiplin dalam kehidupan Militer, karena suatu kesatuan tanpa memagang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang sangat membahayakan baik bagi masyarakat maupun Negara.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI : “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin.”

Dalam Sapta Marga dan Sumpah prajurit telah ditekankan bahwa para prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan adanya empat Lingkungan Peradilan yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Lingkungan Peradilan Militer.

Melihat dari kenyataan bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peradilan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sangat berbeda dengan peradilan lainnya, karena dalam pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia berlaku suatu sistem dan cara serta norma-norma disiplin hukum lain yang berlaku dalam jajaran badan peradilan umum.

Salah satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota tentara dikelompokkan pada Bab III KUHPT tentang kejahatan – kejahatan yang disebabkan karena anggota tentara itu menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, salah satunya mengenai desersi.

Pasal 87 KUHPT mengancam dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang :

1. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang pada musuh, atau tanpa hak untuk masuk dinas dalam tentara dari Negara atau kekuasaan lain.
2. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya.
3. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dalam arena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta

dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 No 2 KUHPT.

Selanjutnya KUHPT melalui Pasal 87 ayat (2) memberikan sanksi apabila desersi itu dilakukan di masa damai dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Tetapi hukuman itu akan diperberat apabila desersi itu dilakukan dimasa perang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) KUHPT yang mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan. Fakta desersi dimasa damai dan dimasa perang cukup besar selisihnya itulah yang dikejar terdakwa dengan mengajukan pemeriksaan sampai tingkat kasasi untuk memperoleh jawaban dari Mahkamah Agung terkait dengan dakwaan ODITUR kepada terdakwa yang dipersalahkan melakukan desersi pada masa perang.

Putusan Mahkamah agung ternyata mengabulkan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dengan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan dan Pengadilan Militer Medan dengan menetapkan desersi yang dilakukan terdakwa tidak masuk dalam kategori desersi di masa perang sehingga putusan itu meringankan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam suatu skripsi untuk mengetahui apa pertimbangan Mahkamah Agung yang menetapkan sebagai desersi pada masa damai dan selanjutnya akan melihat apa dasar hukum dari penetapan Mahkamah Agung dalam putusan itu, oleh karena itu berdasarkan pada pemikiran-pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan dan menulis dalam skripsi dengan judul : “ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 60K/MIL/1995)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang dan pembatasan masalah dimana perumusan tersebut antara lain :

1. Apa pertimbangan Mahkamah Agung dalam penetapan desersi pada masa perang dan pada masa damai pada putusannya?
2. Apakah akibat hukum dari penetapan desersi pada masa perang dan pada masa damai bagi terdakwa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam penetapan desersi pada masa perang dan pada masa damai
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan desersi pada masa perang dan pada masa damai dan akibat hukumnya
2. Tujuan Subyektif.
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan guna penulisan penelitian, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Menambah pengetahuan penulis dalam penulisan ilmu hukum acara pidana.
  - c. Membandingkan materi di perkuliahan dengan kenyataan sehari-hari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum terutama hukum pidana.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa medeskripsikan bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam penetapan desersi pada masa perang dan pada masa damai.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan saran bagi pihak terkait dalam penentuan desersi pada masa perang atau pada masa damai.

#### **E. Metode Penelitian**

Tahap yang cukup penting dalam penelitian ilmiah adalah penentuan metode penelitian yang akan dipakai dapat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dengan efektif. Metode penelitian ini akan sangat berpengaruh dalam penelitian data, teknik analisis data dan yang paling utama hasil penelitian nantinya.

##### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Amirudin dan Z. Asikin. 2004 : 25).

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
  - 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  - 4) Putusan Mahkamah Agung No. 60 K /MIL/1995
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
  - 1) Hasil karya ilmiah yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
  - 2) Hasil-hasil penelitian yang terkait/relevan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, diantaranya :
  - 1) Bahan dari internet yang relevan
  - 2) Kamus hukum

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan desersi oleh Mahkamah Agung dalam masa damai. Selain sumber data yang berupa undang-undang Negara ataupun peraturan pemerintah, data juga diperoleh dari makalah-makalah, buku-buku referensi dan artikel media massa yang mengulas tentang desersi Mahkamah Agung.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan studi pustaka atau telaah buku, metode pustaka ini digunakan agar dalam menggunakan penelitian dari berbagai sumber dan terkait dengan penelitian ini dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan. Cara memperoleh data adalah dengan cara membaca dan mempelajari obyek penelitian lalu mencatat hal-hal yang penting sehingga dapat terkumpul. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku yang berhubungan dengan materi kemudian diselaraskan dengan bahan dari kepustakaan sebagai bahan acuan dari bahan referensi penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengidentifikasikan literatur-literatur yang berupa buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen, artikel-artikel serta hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam pemecahan masalah penarikan kesimpulan dari kasus yang diteliti sangat tergantung dari analisis data, sehingga diperoleh penelitian yang mempunyai kualitas yang baik. Pada analisa data, data dikerjakan dan digunakan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk menjawab persoalan-persoalan yang diteliti dengan kebenaran analisa berdasarkan literatur dan dasar teori yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan tentang Mahkamah Agung**

###### **a. Kekuasaan Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung dalam konteks ketatanegaraan, maka titik tolaknya bertumpu pada Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan sebagai berikut :

Pasal 24 :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi..
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

Pasal 25 :

Syarat- syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kekuasaan MA Menurut Pasal 28, 29 dan 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah :

Pasal 28 :

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili ; c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembagian tugas dalam Mahkamah Agung.

Pasal 29 :

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.

Pasal 30 :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan - pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena : a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kekuasaan Mahkamah Agung harus independen dan terpisah dari kekuasaan negara lainnya. Independen itu meliputi kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantif judicial independence*) dan kemandirian internal dan kemandirian kelembagaan (*institutional judicial independence*).

Kemandirian substantif adalah kemandirian didalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Kemandirian institusional adalah kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya didalam memutuskan suatu perkara.

Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonalian kehakiman meliputi antara lain rekrutmen, mutasi, promosi,

penggajian, masa kerja, masa pensiun. Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.

Fungsi utama dari Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga peradilan adalah mewujudkan tujuan hakiki dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, *interpreter of the constitution*, menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *check and balance* guna menegakkan prinsip-prinsip negara hukum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

- 1) Fungsi *Yudicial* menyelenggarakan peradilan dengan melaksanakan dan menerapkan hukum secara tepat dan adil.
- 2) Fungsi *Review (toetsingsrecht)* adalah hak untuk menguji secara materiil berbagai peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi dengan mekanisme prosedural yang tidak menyulitkan.
- 3) Fungsi *Supervisi* adalah pertama: pengawasan dan pembinaan tertinggi terhadap proses penyelenggaraan peradilan disemua tingkat dan lingkup peradilan; kedua : pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim; ketiga : meminta keterangan mengenai teknis peradilan; keempat: mempunyai kewenangan untuk memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang diperlukan.
- 4) Fungsi *Legislasi* adalah membuat berbagai peraturan dan kebijakan untuk menindaklanjuti dan melengkapi kekurangan atau kekosongan hukum secara proaktif kepada lembaga tinggi negara terhadap hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, memberikan usulan dan pertimbangan hukum kepada Presiden untuk grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
- 5) Fungsi Administrasi adalah mengelola hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian, keuangan dan administrasi kelembagaan

yaitu antara lain rekrutmen, mutasi, promosi, penganggaran, penggajian dana masa kerja.

Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan keadilan dan menegakkan hukum demi terselenggaranya Negara Hukum.

Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Agama, militer dan Tata Usaha Negara maupun peradilan lainnya. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan terlepas dan terpisah dari pengaruh kekuasaan negara lainnya.

b. Kasasi Mahkamah Agung

Kasasi adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan Tinggi dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut.

Kontra memori kasasi adalah suatu bentuk penyanggahan atas alasan hukum yang dijadikan dasar bagi pemohon kasasi atas putusan majelis hakim dalam tingkat banding. Apabila kita sebagai pihak termohon dalam kasasi maka kita diharuskan untuk membuat sebuah kontra kasasi.

Fungsi Kasasi adalah untuk menentukan :

- 1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

Kasasi bertujuan untuk :

- 1) koreksi terhadap putusan pengadilan bawahan.

- 2) Menciptakan dan membentuk hukum baru.
- 3) Pengawasan terciptanya penerapan hukum.

Putusan yang dapat di Kasasi :

- 1) Semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan.
- 2) Kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung dan putusan bebas.
- 3) Semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambil pada tingkat banding.

## 2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Desersi

### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *Strafbaarfeit* oleh beberapa ahli hukum Indonesia diterjemahkan dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam KUHP dikenal istilah *Strafbaarfeit*, atau yang dalam ilmu pengetahuan hukum disebut delik. Sedangkan pembuat Undang-undang dalam merumuskan Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. *Strafbaarfeit* sendiri berarti suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangan, jadi yang diancam pidana adalah manusia, sehingga banyak ahli hukum yang mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai tindak pidana. Menurut Pompe pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan :

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*fekt*) yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut Simons, *Strafbaarfeit* diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab. Simons (dalam Wirjono Prodjodikoro, 1992 : 4).

Pemberian definisi tentang pengertian hukum atau pengertian dalam ilmu-ilmu sosialnya pastilah terdapat perbedaan-perbedaan pendapat, maka dalam pemberian pengertian terhadap definisi tindak pidana juga terdapat bermacam-macam pendapat yang diberikan oleh para sarjana. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat para Sarjana yang antara lain :

“ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”. ( Wirjono Prodjodikoro, 1996: 55).

Menurut pendapat Simons (dalam Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 56) :

“*Strafbaarfeit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab”.

Menurut pendapat Moeljatno :

“Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.(Moeljatno,1983: 54)

Sedangkan menurut Van Hammel (dalam Wirjono Prodjodikoro,1983 : 54) :

“*Strafbaarfeit* yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan “.

Pengertian tindak pidana atau *Strafbaarfeit* yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yaitu melanggar suatu aturan hukum pidana atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh suatu aturan hukum positif serta perbuatan yang apabila melanggar diancam dengan pidana oleh karena itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana apabila ada suatu

kenyataan bahwa ada aturan yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, dalam larangan dan ancaman tersebut terdapat hubungan yang erat. Oleh karena itu antara peristiwa dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada suatu kemungkinan hubungan yang erat dimana satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Guna menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakan perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit yaitu :

- 1) Adanya kejadian yang tertentu serta
  - 2) Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.
- (Moeljatno, 1982, 39).

b. Tindak Pidana Desersi

Banyak hal yang menjadi kejahatan dalam militer salah satunya adalah cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas yang sering disebut yang sering disebut desersi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Militer definisi desersi sebagai berikut :

Pasal 85

“Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam :

Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu.



Ke-3, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu, dalam waktu poerang tidak lebih lama dari empat hari.

Ke-4, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau teragalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

#### Pasal 86

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam :

Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran aitu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

#### Pasal 87

(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Sedangkan pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

1) Pidana-pidana utama:

ke-1, Pidana mati

ke-2, Pidana penjara

ke-3, Pidana kurungan

ke-4, Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).

2) Pidana-pidana tambahan:

Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Ke-2, Penurunan pangkat

Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **3. Tinjauan Umum tentang Prajurit TNI**

a. Pengertian Prajurit TNI

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, prajurit

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah Panglima .

b. Kewajiban dan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI

Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan Negara untuk melakukan usaha pembelaan Negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Untuk keamanan Negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban prajurit berpedoman pada kode etik Prajurit dan kode etik perwira. Selain itu berpedoman pada Hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setia tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai prajurit TNI yang tidak lepas dari pelanggaran terhadap hukum disiplin prajurit TNI yang meliputi :

- 1) Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- 2) Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya dsingkat Papera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat

(Pasal 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit).

Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

#### **4. Tinjauan Tentang Peradilan Militer**

Pada Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menerangkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Sedangkan Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan Negara di bidang penuntutan dan penyelidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Dalam hal pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, financial badan-badan Pengadilan Oditurat dilakukan oleh Panglima dan dalam pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata dimana pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - (a) Prajurit
  - (b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.

- (c) Anggota suatu atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang.
  - (d) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c), tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
  - 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutuskan kedua perkara tersebut dalam satu perkara.

Dalam peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka (prajurit Tentara Nasional Indonesia ) yang dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yaitu :

- 1) Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya, atau
- 2) Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Susunan Pengadilan Militer sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari :

- a. Pengadilan militer
- b. Pengadilan Militer Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama
- d. Pengadilan Militer Pertempuran

Sedangkan kekuasaan pengadilan militer menurut Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf dan huruf c yang terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Kapten kebawah
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi adalah :

(1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama

- a. Memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang terdakwa adalah :
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah satu terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Mayor keatas
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Tingkat Tinggi

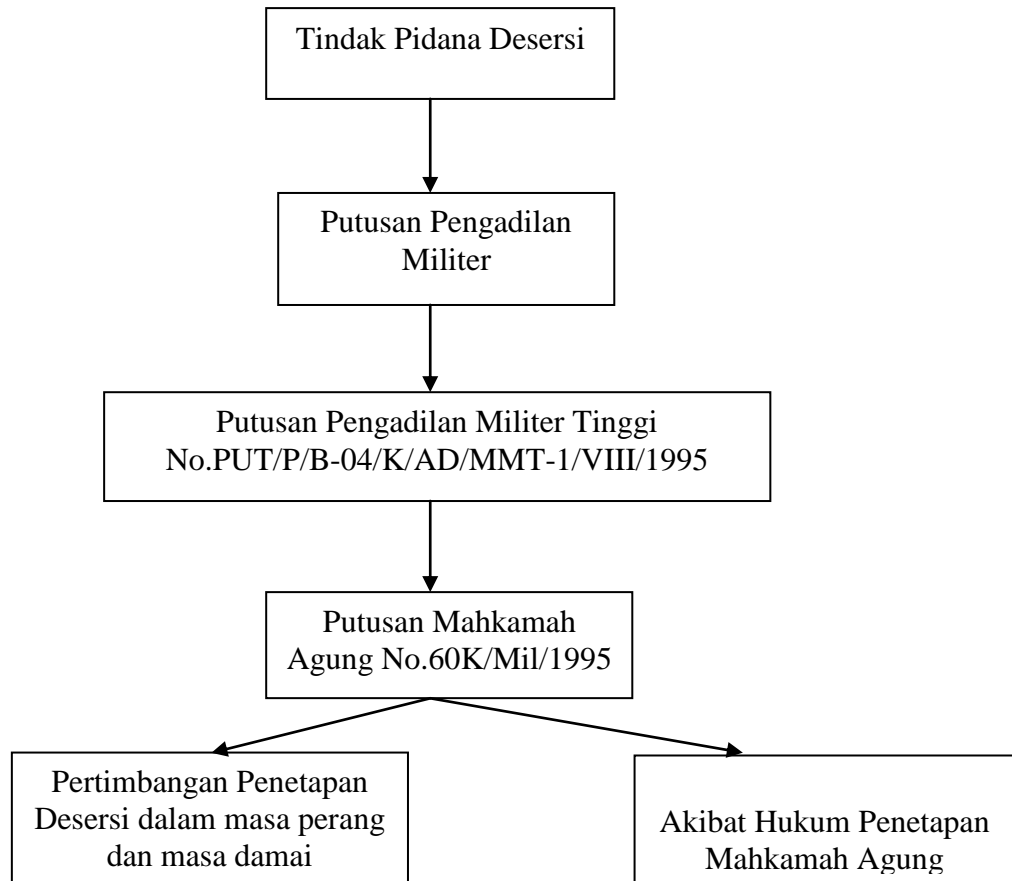
(2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding

(3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer kekuasaan Pengadilan Militer Utama adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Kekuasaan pengadilan pertempuran sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah : Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan meminta pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.

## B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam perkara Tindak Pidana desersi yang dilakukan oleh tentara telah diadili dan diputus di Pengadilan Militer Medan dengan menetapkan terdakwa bersalah melakukan desersi pada masa perang dan di hukum pidana dengan penjara 8 bulan.

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi Medan sehingga terdakwa tetap dipersalahkan melakukan desersi pada masa perang,

terhadap peraturan pengadilan tinggi tersebut terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan merubah penetapan desersi pada masa perang dig anti menjadi desersi pada masa damai. Pertimbangan Mahkamah Agung adalah tugas terdakwa di Timor Timur adalah bukan pada masa perang.

Akibat hukum dari penetapan Mahkamah Agung tersebut terdakwa di bebaskan oleh dakwaan primair melakukan desersi pada masa perang pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan dinyatakan bersalah melakukan desersi pada masa damai sehingga hukumnya menjadi ringan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH**

##### **A. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Penetapan Desersi Pada Masa Perang dan Masa Damai**

Untuk membahas pertimbangan Mahkamah Agung dalam penetapan desersi di masa perang dan desersi pada masa damai di dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No 60 K / Mil / 1995 berikut ini disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

###### **1. Identitas Terdakwa**

Nama	: Figuatri
Pangkat/Nip	: Pratu / 61 /388
Jabatan	: TAKIMA
Kesatuan	: Yonif 1333/Yudha Sakti
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang /23 Agustus 1967
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Suku	: Indonesia/Minang
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 133 / YS Air Tawar Padang

###### **2. Surat Dakwaan**

Yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer 1- 03 tersebut karena didakwa :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada waktu – waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan September tahun 1900 sembilan puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun 1900 sembilan puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam tahun 1900 sembilan puluh dua sampai dua sampai dengan tahun 1900 sembilan puluh empat di Kesatuannya Yonif 131 /Brs. Propinsi Sumatra Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer I – 03 Padang telah melakukan tindak pidana : ”Militer yang karena salahnya atau sengaja melakukan kehadiran tanpa izin dalam waktu perang lebih lama dari empat hari ”. Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak tahun 1987 terdakwa termasuk anggota TNI – Ad melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 133/YS, jabatan Ta Kima dengan pangkat Pratu Nrp. 617388 sampai sekarang.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dan Yonif 133 YS nomor : Sprin/111/VIII/1992 tanggal 10 Agustus atas nama Pratu FIGUATRI nrp 617388 di BP kan Yonif 131 / Brs dalam rangka pelaksanaan tugas operasi ke Timor-Timur.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah tersebut awal bulan September 1992 terdakwa melaporkan dirinya ke Yonif 131/Brs dan

selanjutnya terdakwa diberikan jabatan regu III, Peleton III, Kompi C dan mengikuti latihan pra tugas Operai ke Timor-Timur.

- d. Bahwa pada tanggal 7 September 1992 terdakwa telah meminta izin kepada atasannya untuk mengurus administrasi pernikahannya ke Padang dan diizinkan selama 3 (tiga) hari sesuai dengan surat Izin Nomor : Sij/618/IX/1992 tanggal 7 September 1992.
- e. Bahwa pada tanggal 10 September 1992 pengurusan administrasi pernikahannya tersebut telah selesai, karena telah habis maka terdakwa kembali ke kesatuan lagi lalu terdakwa melaporkan kepada atasannya, akan tetapi oleh atasannya di jawab : "agar pelaksanaan pernikahannya setelah terdakwa melaksanakan operasi Timor-Timur".
- f. Bahwa dengan keputusan atasannya tersebut, Terdakwa ,menjadi kecewa, maka pada tanggal 11 September 1992 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasannya pergi ke rumah mertua Terdakwa di Simpang Piai Pauh Padang lalu pada sore harinya dengan kendaraan bus pergi ke Tanah Abang Jakarta.
- g. Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak melaporkan dirinya ke kesatuan maupun instansi ABRI yang terdekat.
- h. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1994 terdakwa ditangkap oleh Provost Yonif 133/YS dan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- i. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 11 September 1992 sampai dengan tanggal 27 Oktober 1994 atau selama  $\pm$  766 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) hari secara terus menerus.

#### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair telah melakukan tindak pidana :  
 ”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair;

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Dakwaan Primair : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (3) KUHPM

Dakwaan Subsidair : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

#### 3. Tuntutan Oditur

Setelah membaca tuntutan Oditur tanggal 20 Maret 1995 yang isinya adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :  
 ”Desersi di masa perang ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (3) KUHPM

b. Dengan mengingat pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (3) KUHPM ;

Selanjutnya Oditur mohon agar Terdakwa Pratu Figuatri Nrp. 617388 dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi  
Terdakwa berada dalam penahanan  
sementara
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Dengan permohonan Terdakwa ditahan

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1 (satu) lembar surat keterangan dari Dan Yonif 133/YS Nomor : SK/01/XI/1994 tanggal 17 November 1994 atas nama Pratu Figuatri Nrp.617388 tetap terlampir di dalam berkas perkara

b. Barang-barang

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) .

#### 4. Putusan Pengadilan Militer

Dengan memperhatikan pasal-pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (3) KUHPM jo pasal 87 ayat (1) ke – 2 jo ayat (2) KUHPM dan pasal-pasal lainnya yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer I-03 tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan bersalah Terdakwa tersebut bernama Figuatri pangkat prajurit Satu Nrp. 617388, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa perang".
  - b. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 20 (duapuluh) hari menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daari pidana yang dijatuhkan
    - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
    - 3) Memerintahkan Terdakwa ditahan
    - 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 1.500,- (serbu lima ratusrupiah)
    - 5) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dan Yonif 133/YS Nomor : SK/01/XI/1994 tanggal 17 November 1994 atas nama Pratu Figuatri Nrp.617388 tetap terlampir di dalam berkas perkara.
5. Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan
- Putusan dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi I Medan dengan putusannya tanggal 11 Agustus 1995 Nomor : PUT/B-04/K/AD/MMT-I/VIII/1995 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

- a. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa PRATU FIGUATRI NRP.617388
- b. Memperbaiki putusan Majelis Hakim MahMil I-03 Padang Nomor : PUT/70-K/MMT-03/AD/III/1994 tanggal 20 Maret sekedar mengenai lamanya pidana pokok penjara yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

- c. Menguatkan putusan Majelis Hakim MahMil I-03 Padang tersebut di atas untuk selebihnya
- d. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah);
- e. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Mahkamah Militer I-03 Padang.

#### 6. Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Tentang Dakwaan Oditur Militer

Bahwa Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor Dak/02/K/AS/1995 tanggal 24 Januari 1995 antara dakwaan Primair dan subsidair mengenai urutan kejadian tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi hanya menggabungkan menjadi satu uraian sehingga dakwaan tersebut menjadi kabur. Hal ini bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyebutkan :”Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Maka surat dakwaan tersebut harus batal demi hukum. .

b. Tentang Putusan Mahkamah Militer I-03 Padang

Bahwa Putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor : PUT/70-K/MM I-03/AD/III/1995 tanggal 20 Maret 1995 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan No. Put/B-04/K/Ad?MT-I/VIII/1995 tanggal 11 Agustus 1995 yang menyatakan Pemohon Kasasi telah bersalah melakukan tindak pidana ”Desersi yang dilakukan di masa perang ” mengenai pembuktian unsur keempat yaitu :



Dalam waktu perang lebih lama empat hari adalah tidak benar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena dalam unsur ke empat tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Pemohon kasasi selaku Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin di masa perang, tetapi hanya disebut kalau Pemohon Kasasi telah meninggalkan jesatuan tanpa izin selama 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) hari dan pergi ke beberapa tempat antara lain Jakarta, Jambi dan wilayah lainnya dari Indonesia yang secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Negara RI dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan perang atau setidaknya tidaknya kesatuan Yonif 133 dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan perang, sebagaimana yang dibuktikan oleh MahMil I-03 Padang dalam unsur keempatnya tersebut. Disamping itu sesuai dengan bunyi Pasal 11 UUD 1945 yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan perang adalah presiden dengan persetujuan DPR, sedangkan Presiden RI tidak pernah menyatakan negara RI dalam keadaan perang. Pemohon kasasi tidak setuju atas penafsiran keadaan perang yaitu adanya tugas dari Penguasa Militer, sehingga dakwaan primair dari surat Oditur Militer I-03 Padang tersebut adalah batal demi hukum.

- c. Bahwa Pemohon Kasasi dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan keluarga yang mempunyai anak dan isteri yang memerlukan biaya, telah menyadari sedalam-dalamnya, sangat

menyesal akan kesalahan yang telah diperbuat dan berjanji akan mengabdikan diri dalam dinas militer serta telah memohon ampun kepada Allah SWT, sehingga pemohon Kasasi merasa pukulan berat atas pemecatan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi. Untuk itu pemohon Kasasi mohon agar putusan MahMil I-03 Padang yang dikuatkan oleh Putusan MAHMILTI I Medan agar diperiksa kembali.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad ”: 1

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Mengenai keberatan ad : 2

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex factie salah menerapkan hukum, yaitu pertimbangan putusannya dalam menilai unsur keadaan perang, sebagaimana uraian dari pada dakwaan Oditur Militer tentang keadaan perang belum sampai kepada suatu kesimpulan bahwa negara dalam keadaan perang seperti maksud ketentuan Undang-Undang untuk hal itu. Akan tetapi menurut Mahkamah Agung uraian tersebut baru sampai pada keadaan Operasi Militer untuk menanggulangi gangguan kemanan saja.

Dengan demikian dakwaan primair Oditur itu tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2)

huruf b KUHP Undang-Undang No 8 tahun 1981 sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan ad 2 dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Agung Militer Tinggi di Medan tanggal 11 Agustus 1995 Nomor : PUT/B-04/K/AD/MMT-I VIII/1995 yang telah memperbaiki putusan Mahkamah Militer I-03 di Padang tanggal 20 Maret Nomor : PUT/70-K/MMI-03/AD III/1995 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selanjutnya menilai dakwaan Subsidair Oditur Militer yaitu melakukan "Desersi dimasa damai", yang unsur-unsurnya :

- a. "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- b. "Dimasa damai"

Ad 1. Bahwa sejak tanggal 11 September 1992 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin. Komandan menuju Simpang Piai Pauh Padang yaitu rumah mertuanya dan selanjutnya menuju Jakarta yang pada akhirnya Terdakwa kembali ke Padang mencari nafkah sebagai supir, sampai ia ditangkap pada tanggal 27 Oktober 1994 oleh Provost Yonif 133/YS.

Bahwa dalam tenggang waktu antara tanggal 11 September 1992 s/d 27 Oktober 1994 terdakwa seharusnya berada di kesatuannya pada Yonif 133/YS yang berdomisili di Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ad 1 dari dakwaan Subsidair Oditur Militer dinyatakan telah terbukti.

#### Ad.2. "Dimasa Damai"

Pada tempo Terdakwa melakukan Desersi, Negara RI tidak sedang berperang dengan suatu negara, dimana keadaan perang harus diumumkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ad.2 tersebut dinyatakan telah terbukti..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dalam dakwaan Subsidair Oditur Militer telah terbukti maka dakwaan itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di dalam kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini ternyata permohonan kasasi dari terdakwa dikabulkan, akan tetapi tetap di hukum, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam semua tingak peradilan.

Memperhatikan Undang-Undang No 14 tahun 1970, Undang-Undang No 8 tahun 1981, Undang-Undang No 14 tahun 1985 dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### 7. Putusan Mahkamah Agung .

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah mengabulkan kasasi terdakwa FIGUATRI PRATU / 617388 tersebut :

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi I di Medan tanggal 11 Agustus 1995 nomor : PUT/B-04/K/AD/MMT-I/VIII/1995 yang telah memperbaiki putusan Mahkamah Militer I-03 di Padang tanggal 20 Maret 1995 Nomor PUT/70-K/MMI-03/AD/III/1995 :

Menyatakan bahwa tidak dapat diterima dakwaan Primair dari Oditur pada Mahkamah Militer I-03 di Padang tersebut ;

Menyatakan terdakwa Figuatri Pratu/617388 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ”desersi di masa damai”; menghukum terdakwa oleh karena itu dengan :

Hukuman Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

Hukuman Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Memerintahkan terdakwa ditahan

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat – surat

1 (satu) lembar surat keterangan dari Dan Yonif 133/YS Nomor : SK/01/XI/1994 tanggal 17 November 1994 atas nama Pratu Figuatri Nrp.617388 tetap terlampir di dalam berkas perkara

b. Barang-barang

Membebaskan kepada pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam memori kasasi permohonan kasasi mengajukan alasan bahwa putusan Pengadilan Militer Padang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan yang menyatakan pemohon kasasi telah bersalah melakukan tindak pidana desersi yang dilakukan dimasa perang yaitu unsur keempat yaitu : Dalam waktu perang lebih dari empat hari adalah tidak benar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dari unsur keempat tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa

terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada waktu perang. Tetapi hanya disebutkan terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama 775 hari dan pergi ke beberapa tempat antara lain Jakarta, Jambi dan beberapa wilayah lain di Indonesia yang secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan perang.

Disamping alasan itu, Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan perang adalah presiden dengan persetujuan DPR, sedangkan Presiden Republik Indonesia tidak pernah menyatakan negara Republik Indonesia dalam keadaan perang.

Pemohon kasasi juga tidak pernah setuju atas penafsiran perang yaitu adanya tugas dari penguasa militer. Keberatan atau alasan pemohon kasasi itu telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan suatu *Judex Factie* telah salah menegakkan hukum yaitu pertimbangan putusan dalam menilai suatu keadaan perang, belum sampai pada suatu keimpulan bahwa negara dalam keadaan perang tetapi menurut Mahkamah Agung uraian dakwaan oditur militer tersebut baru sampai pada keadaan operasi militer untuk menanggulangi gangguan keamanan saja.

Mahkamah Agung menilai dakwaan Oditur Militer itu tidak diuraikan secara cermat dan jelas dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan

dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah Agung yang tersebut adalah dakwaan subsidair yaitu melakukan desersi di masa damai sehingga Mahkamah Agung menjatukan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dan dipecat dari dinas militer.

Putusan Mahkamah Agung ini lebih ringan dibandingkan dengan putusan Pengadilan Militer Padang yang menjatuhkan pidana penjara atas kesalahan melakukan desersi dimasa perang dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 20 hari dikurangi masa penahanan serta dipecat dari dinas militer dan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Padang.

Penulis sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penetapan desersi pada masa perang yang diganti dengan desersi pada masa damai, apa yang dilakukan terdakwa dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 11 September 1997 sampai 27 Oktober 1994 berarti telah melakukan desersi yang pada waktu itu negara tidak sedang dalam keadaan berperang dengan negara lain.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 keadaan perang itu harus dengan pengumuman oleh Presiden yang disetujui oleh DPR sedangkan pada waktu itu tidak pernah Presiden Republik Indonesia menyatakan negara dalam keadaan perang.



## **B. Akibat Hukum dari Penetapan Desersi Pada Masa Perang dan Pada Masa Damai .**

Dalam sidang Oditur Militer Padang telah mendakwa Primair karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu perang lebih lama dari empat hari dan dalam dakwaan subsidair karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari.

Atas dakwaan tersebut Pengadilan Militer Paang telah memutuskan terbukti dakwaan primair melakukan desersi pada masa perang, putusan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi Medan.

Dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh terdakwa, Mahkamah Agung telah memutus dengan menetapkan terdakwa adalah karena salahnya dan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari sebagaimana dicantumkan dalam dakwaan subsidair yang diajukan oleh Oditur Militer Padang.

Akibat hukum dari penetapan desersi pada masa damai yang diputuskan oleh Mahkamah Agung membawa konsekuensi hukum sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang terbukti dan telah berkekuatan hukum tetap adalah karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai lebih dari tiga puluh hari.

2. Dengan penetapan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan merubah hukuman yang dijatuhkan dari semula putusan Pengadilan Militer Padang adalah berupa pidana penjara selama satu tahun dan pemecatan dari dinas militer dan itu dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi Medan dengan menjadi pidana penjara selama delapan bulan, Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan pemecatan dari dinas militer.
3. Melalui putusan Mahkamah Agung diperoleh suatu yurisprudensi tentang keadaan perang dan keadaan damai bahwa Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 keadaan perang itu harus dengan keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR. Keadaan yang disampaikan oleh oditur militer dalam surat dakwaan belum masuk dalam kategori perang pada keadaan operasi militer untuk menanggulangi gangguan keamanan saja

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan menganalisa data-data, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Mahkamah Agung Mahkamah Agung dalam penetapan Desersi Pada Masa Perang dan Masa Damai

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah bahwa Mahkamah Agung dengan pertimbangan suatu *Judex Factie* telah salah menegakkan hukum yaitu pertimbangan putusan dalam menilai suatu keadaan perang, belum sampai pada suatu keimpulan bahwa negara dalam keadaan perang tetapi menurut Mahkamah Agung uraian dakwaan oditur militer tersebut baru sampai pada keadaan operasi militer untuk menanggulangi gangguan keamanan saja.

Mahkamah Agung menilai dakwaan Oditur Militer itu tidak diuraikan secara cermat dan jelas dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah Agung yang tersebut adalah dakwaan subsidair yaitu melakukan desersi di masa damai sehingga Mahkamah Agung menjatukan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dan dipecat dari dinas militer.

## 2. Akibat Hukum dari Penetapan Desersi Pada Masa Perang dan Pada Masa Damai

Akibat hukum dari penetapan desersi pada masa damai yang diputuskan oleh Mahkamah Agung membawa konsekuensi hukum sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang terbukti dan telah berkekuatan hukum tetap adalah karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai lebih dari tiga puluh hari.
- b. Dengan penetapan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan merubah hukuman yang dijatuhkan dari semula putusan Pengadilan Militer Padang adalah berupa pidana penjara selama satu tahun dan pemecatan dari dinas militer dan itu dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi Medan dengan menjadi pidana penjara selama delapan bulan, Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan pemecatan dari dinas militer.
- c. Melalui putusan Mahkamah Agung diperoleh suatu yurisprudensi tentang keadaan perang dan keadaan damai bahwa Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 keadaan perang itu harus dengan keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR. Keadaan yang disampaikan oleh oditur militer dalam surat dakwaan belum masuk dalam kategori perang pada keadaan operasi militer untuk menanggulangi gangguan keamanan saja

## **B. Saran – Saran**

Dengan kerendahan hati maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Penetapan desersi pada masa perang yang dibatalkan oleh MA dan kemudian diganti dengan desersi pada masa damai yang ancaman hukumannya lebih ringan maka seharusnya Mahkamah Agung mengurangi putusan pidana menjadi lebih ringan sehingga sejalan dengan ancaman pidananya yang lebih ringan .
2. Hakim Pengadilan Militer hendaknya lebih teliti dalam menjatuhkan putusan dengan mempelajari penetapan perundangan secara lebih cermat sehingga terhindar dari kesalahan dalam putusannya.
3. Bahwa keadaan perang sesuai dengan Pasal 11 UUD 1945 harus dilakukan dengan keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR, keadaan yang disampaikan oleh oditur dalam surat dakwaan belum masuk dalam kategori perang tetapi hanya pada keadaan operasi militer untuk menanggulangi gangguan keamanan saja. .

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. Jakarta : Mahkamah Agung.
- Hamzah Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Moelyatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moch. Faisal Salam. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, Bogor : Politeia
- Subekti. 1994. *Praktek Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Samidjo. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Armico.
- Soerjono Soekanto. 1994. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Duta Karya.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusuma, (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty.*
- Sumadi Suryabrata. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Rajawali Press.
- Suharsimi Arikunto. 1997. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Aneka Karya.

### Undang-undang

- Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum Disiplin ABRI
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer